

DETERMINAN BELANJA MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI PROVINSI JAWA TIMUR

by Dedi Setyawan

Submission date: 23-Aug-2020 08:32PM (UTC+1000)

Submission ID: 1274699805

File name: Untitled.pdf (1.52M)

Word count: 5631

Character count: 35461



**PROSIDING PENELITIAN DIPA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO TAHUN 2017
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE - XXXVI**

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
2017**

**Prosiding Penelitian DIPA Universitas Dr. Soetomo Tahun 2017 dalam Rangka
Dies Nataliske – XXXVI**

“Prosiding Ini Memuat Artikel Hasil Penelitian DIPA Universitas Dr. Soetomo Tahun
Anggaran 2016/2017 yang dipresentasikan dalam seminar Hasil Penelitian DIPA
UNITOMO pada tanggal 19 – 20 Juni 2017”

Susunan Tim Penyunting

Pelindung :

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH. (Rektor)

Penasehat :

Dr. Siti Marwiyah, SH. MH(Warek I)

Dr. Slamet Riyadi, MP., M.Si (Warek II)

Dr. Ir. Suyanto, MM (Warek III)

PenanggungJawab :

Dr. Sri Utami Ady, SE, MM (Ka.Lemlit)

Reviewer :

Dr. Sri Utami Ady, SE, MM (FEB Unitomo)

Dr. Siti Marwiyah, SH, MH (FH Unitomo)

Editor :

Yuni Listiana, S.Pd, M.Si

Layout :

Nurul Agustia, S.Kom

Saiful Anam, S.Sos., M.Ikom

Distribusi :

IB. Purnama Agung, SE

Penerbit :

Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Redaksi :

Gedung B Lantai 1.

Kampus Universitas Dr Soetomo

Jalan Semolowaru No.84 Surabaya 60119

Tlp/Fax. (031)5925970/5924452

lemlit@unitomo.ac.id

NO. ISBN : 978-602-61886-0-1

Cetakan Pertama, Juni 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan luaran penelitian Universitas Dr. Soetomo Surabaya serta untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dibuatlah suatu buku prosiding dari berbagai disiplin ilmu dari 8 fakultas di lingkungan Universitas Dr. Soetomo yang berisi artikel hasil penelitian DIPA untuk Tahun Anggaran 2016/2017. Buku prosiding ini dicetak bertepatan dengan Seminar Hasil Penelitian dalam rangka Dies Natalies Universitas Dr. Soetomo ke 36 tahun 2017 sebagai dedikasi Lembaga Penelitian untuk peningkatan kualitas penelitian Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Isi yang termuat dalam buku ini berupa 26 artikel yang dipresentasikan dalam seminar hasil penelitian dari sumbangsih pemikiran dan kerja keras dosen peneliti Universitas Dr. Soetomo. Penelitian-penelitian yang dihasilkan dibiayai oleh dana DIPA Universitas Dr. Soetomo Surabaya Tahun Anggaran 2016/2017.

Kami berharap dengan diluncurkannya buku “Prosiding Penelitian DIPA Universitas Dr. Soetomo 2017 Dalam Rangka Dies Natalis ke XXXVI” dapat merealisasikan diseminasi dan penyebaran ilmu kepada public dan ada manfaat yang diambil sebagai pemecahan masalah bagi masyarakat dan bangsa.

Diharapkan kedepannya setiap tahun hasil penelitian serupa dapat dibukukan dalam bentuk prosiding juga. Sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dari banyak pihak untuk perbaikan selanjutnya. Kami juga berterimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Surabaya, Juni 2017
Ketua Lembaga Penelitian,

Dr. Sri Utami Adv. S.E.,MM
NPP. 9401.1.170

Daftar Isi Artikel

Halaman Judul.....	i
Susunan Tim Redaksi.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v

I. Penelitian Bidang Fokus ilmu Pendidikan, Administrasi, Ekonomi, Sastra dan Hukum

A. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan :

Perbedaan Hasil Belajar Operasi Perkalian dengan Metode Mathmagic dan Metode Bersusun Pada Siswa Kelas IV MI KH Abu Mansur Surabaya. <i>Suharti Kadar, Ardianik</i>	1-12
--	------

Optimisasi Biaya Minimum dalam Pemenuhan Gizi Seimbang Balita di Surabaya <i>Ahmad Hatip, Rahmawati Erma Standsyah</i>	13-27
---	-------

Pengembangan Materi Pembelajaran BIPA Bermuatan Budaya bagi Penutur Asing Tingkat Pemula <i>Sri Utami, Wahyu Widayati</i>	28-36
--	-------

Pengaruh Strategi Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa SMA <i>Kusmiyati, Viktor Sagala</i>	37-44
--	-------

Metode Logika Fuzzy untuk Analisis Kinerja Asesor Terhadap Hasil Asesmen PSKK BNSP (Studi Kasus pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Dr. Soetomo). <i>Rahmawati Erma Standsyah, Ahmad Hatip</i>	45-51
--	-------

B. Fakultas Ilmu Administrasi :

Pelayanan Publik untuk Nelayan dalam Kepemilikan PAS Kecil pada Kapal dibawah 7 GT di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. <i>Ika Devy Pramudiana, Nihayatus Sholichah</i>	52-67
--	-------

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit sebagai Pemberi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Bagian Rawat Inap Rumah Sakit Haji Surabaya. <i>Sri Roekminiati, Sapto Pramono</i>	68-82
--	-------

Model Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Manajemen Retail Modern bagi Pengelola Koperasi dalam Rangka Menghadapi MEA. <i>Fedianty Augustinah, Anita Asnawi</i>	83-93
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan pelayanan Rapor Online Di SMA Negeri 19 Surabaya. <i>Sri Kamariyah, Sri Roekminiati, Christina Astuti</i>	94-108

C. Fakultas Ekonomi dan Bisnis:

Competitive Dynamic pada Usaha Mikro: Analisis Persepsi Kompetitif pada Kelompok Usaha Penyandang Tuna Rungu di Surabaya. <i>Bambang Raditya Purnomo</i>	109-118
Determinan Belanja Modal dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Perkapita di Provinsi Jawa Timur. <i>Jajuk Suprijati, Shanty Ratna Damayanti</i>	119-131
Analisis Kinerja Keuangan Primer Koperasi STKIP PGRI Bangkalan Tahun Buku 2013-2015. <i>Ilya Farida, Sri Susilowati</i>	132-144

D. Fakultas Sastra:

Konsepsi Dosen Universitas Dr. Soetomo terhadap Leksikon Budaya Bahasa Jawa <i>Ni Nyoman S, Titien Wahyu A, Rahardyan Duwi N</i>	145-156
Implementasi Presuposisi Pragmatik Lewat Karya Sastra Oscar Wilde <i>Syamsuri Ariwibowo, Isnin Ainie</i>	157-166
Simbol Keindahan dalam Puisi Indonesia dan Puisi Jepang <i>Cicilia Tantri Suryawati, Putut Handoko</i>	167-180

E. Fakultas Hukum :

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) oleh Mahkamah Konstitusi <i>Siti Marwiyah, Bachrul Amiq, Syahrul Borman</i>	181-188
Sanksi Tindakan Kebiri Kimia bagi Kejahatan Kekerasan Seksual <i>Noenik Soekorini, Subekti, Dudik Djaja Sidharta</i>	189-202

II. Penelitian Bidang Ilmu Pertanian dan Teknik

A. Fakultas Pertanian :

Analisis Potensi Cadangan Rajungan (*Portunus Pelagicus*) Lestari Kabupaten Pasuruan.

Samsul Huda, Siti Naviah..... 203-211

B. Fakultas Teknik :

Sistem Deteksi Dini untuk Meningkatkan Performance Kelulusan Mahasiswa dengan ID3 (Studi Kasus Teknik Informatika UNITOMO).

Slamet Kacung, Budi Santoso..... 212-216

Dampak Pembangunan Rusunawa Gununganyar Terhadap Kinerja Simpang Tidak Bersinyal Rungkut Madya– Gunung anyar Sawah Kota Surabaya.

Dwi Muryanto, Rudi Santosa 217-225

Perancangan Jaringan dan Otomasi Studio Terintegrasi Stasiun Radio Streaming.

Budi Santoso, Edi Prihartono..... 226-235

Analisis Kelayakan Rencana Pembangunan Embung Di Kabupaten Sampang.

Maulidya Octaviani Bustamin, Evy Harmani 236-247

Model Sederhana Peningkatan Hasil Pertanian Dengan Mengurangi Kehilangan Air Irigasi Yang Tidak Produktif

M. Soemantoro, Evy Harmani 248-255

Dampak Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Nilai Koefisien Aliran (C).

Evy Harmani, M. Soemantoro..... 256-266

1
DETERMINAN BELANJA MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENDAPATAN PERKAPITA DI PROVINSI
JAWA TIMUR

Jajuk Suprijati¹⁾, Shanty Ratna Damayanti²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo Surabaya

jajuksuprijati@gmail.com

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Shanty262@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the factors affecting Capital Expenditure and then test the influence of these factors and Capital Expenditure on Income per capita in East Java. Factors affecting capital expenditures are X1 Local Income (PAD) X1, General Allocation Fund (DAU) X2, Special Allocation Fund (DAK) X3 and Financial Assistance (BK) X4, which then These factors become independent variables. While the dependent variable consists of Capital Expenditure (BM) Y1 and Income Perkapita (PP) Y2 .. The sample in the study consisted of 29 districts and 9 cities in East Java Province with a research period of seven years ie budget year 2003 - 2015. Sampling technique Selected by purposive sampling. The data used are secondary data taken from APBD Realization report of fiscal year 2003 - 2015 and data derived from BPS. This research method uses Analyst Model Path or precisely Two Path Analysis Model because it uses two dependent variable and four independent variables. The results of this study indicate that:

From the processing of data of phase I obtained in table coefficient can be seen that the value of significance of four variables that is $X1 = 0,000$ and $X3 = 0.000$ positive significantly smaller than 0,005 and $X2 = 0,004$ and $X4 = 0,000$ negative significant less than 0,05. This result gives the conclusion that Regression of Model I that variabel $X1$, $X2$, $X3$ and $X4$ have significant effect to variable $Y1$, and in this model I free variabel does not influence simultaneously on variable $Y1$. The magnitude value of R^2 equal to 0,919 this indicate contribution or contribution influence $X1$, $X2$, $X3$ and $X4$ to Y is 91.9% while the remaining 8.1% is the contribution of other variables not included in the research,

From the processing of data of phase II obtained in the table coefficient can be seen that the significance value of four variables that is $X1 = 0,000$ positive significant and $X2 = 0,000$ significant negative and $X4 = 0.011$ negative significantly smaller than 0.05 medium $X3 = 0.368$ and $Y1 = 0.660$ not significant . This result gives the conclusion that Regression of Model II that is variabel $X1$, $X2$, $X4$ have significant effect to variable $Y2$. Pada model II this free variabel does not have simultaneous effect on variable $Y2$ R^2 value equal to 0,546 this indicate contribution or contribution influence $X1$, $X2$, and $X4$ to $Y2$ is 54.6% while the remaining 45.2% is the contribution of other variables not included in the researcher.

Keywords: Capital Expenditures, Local Original Income, Special Allocation Funds, Finance and Per Capita Revenues.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 , spesifiknya pada alinia empat pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencapai tujuan mulia tersebut, tahun 1999 terjadi perubahan dari system pemerintahan sentralisasi menjadi system pemerintahan Desentralisasi. Perubahan ini , selain untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia juga untuk efisiensi dalam pengambilan keputusan di masing-masing daerah di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu bentuk Desentralisasi adalah Desentralisasi Fiskal, yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pengelolaan ini meliputi pengelolaan penerimaan dan belanja Daerah

Belanja Modal adalah bagian dari belanja langsung dalam struktur APBD suatu daerah. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD provinsi dan APBN Pemerintah.

Dari sisi penerimaan dapat dilihat bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Menurut UU No 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah merupakan sumber asli penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak, retribusi ,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan di suatu daerah. Apabila suatu daerah dengan Pendapatan Asli Daerahnya dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik maka daerah itu akan maju dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat akan berkurang.

Selain PAD pemerintah daerah juga mendapatkan dana perimbangan . Dana perimbangan berasal dari APBN yang terdiri dari Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari penyaluran dana perimbangan adalah membantu daerah dalam membiayai kewenangannya , dan digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah dan digunakan meminimalisasi risiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Perhitungan penerimaan Dana Alokasi Umum ini berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah , dimana merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan kebutuhan daerah (*fiscal capacity*).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan atau kebutuhan yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana APBN (Situngkis dan Manurung, 2009). DAK pada dasarnya digunakan untuk membantu daerah dalam memdanai kebutuhan pembangunan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan, air minum, sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana (KB), kesehatan, prasarana pedesaan dan perdagangan.

Bantuan Keuangan mencakup belanja bantuan bidang sarana dan prasarana, bidang pendidikan, FEDEP, rehabilitasi lahan kritis, TMMD, profil daerah. Ratio pendanaan yang

1
berasal dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota : Alokasi Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan diatas pengelolaan dana pembangunan yang baik dan benar maka akan dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut dan akhirnya kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat. Salah satu indicator kesejahteraan masyarakat dapat diukur salah satunya dengan melihat pendapatan perkapita.

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDP) perkapita.

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan berpengaruh pada Belanja Modal ? Apakah factor-faktor Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan berpengaruh dan Belanja Modal berpengaruh pada Pendapatan Perkapita? Apakah Belanja Modal berpengaruh pada Pendapatan Perkapita ? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan terhadap Belanja Modal dan selanjutnya dengan Metode Analisis Dua Jalur diteliti pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan keuangan dan Belanja modal terhadap Pendapatan perkapita dan yang terakhir pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan strategis dimasa yang akan datang dan semakin meningkatkan dalam memberi pelayanan kepada publik.

Kajian Literatur

Asas Umum Pengelolaan Keuangan

Menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah . Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:(a).Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan , keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.(b).Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menambah uraian sebagai berikut:(a).Taati pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan,.(b).Efetif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil,(c)Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu,(d).Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah,(e).Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan ases informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.(a).Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendal sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,(b).Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan /atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang

obyektif.(c).Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.(d)Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Government Expenditure Theory

Berdasarkan teori Kebijakan Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure Theory) melalui mekanisme ISLM, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurve pendapatan nasional naik keatas atau pendapatan nasional meningkat. Kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan tingkat harga umum. Berdasarkan mekanisme IS maka kenaikan harga menyebabkan upah riil menurun. Penurunan upah riil menyebabkan pengangguran berkurang dengan kata lain employment meningkat. Peningkatan tenaga kerja berdasarkan teori produksi akan meningkatkan output nasional. Dengan demikian kenaikan belanja pemerintah diyakini akan meningkatkan output nasional atau pendapatan nasional yang sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita (Langdana, 2009). Wagner (1883) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar juga.

Pendapat ini mendasarkan Peacock & Wiseman (1967), menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

Desentralisasi Fiskal

Saragih (2003), desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Syahrudin (2006) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai kewenangan (authority) dan tanggungjawab (responsibility) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal sebagai upaya pemindahan kekuasaan untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial dan fiskal (Ferdiana, dkk, 2008).

Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

¹ Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber yang berasal dari daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang menurut Halim, 2004:96, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali dari daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha Daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota dengan besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN sedangkan untuk proporsi yang dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/ kota. Penetapan dana alokasi umum menggunakan formulasi pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS Daerah

$$DAU = \text{Alokasi dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

$$\text{Ket: AD} = \text{Gaji PNS Daerah}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah Daerah. Pendapatan Kabupaten/Kota sekitar 80% berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk Provinsi sebesar sekitar 30%.

¹ Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping minimal 10 % dari total alokasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:107) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber

1

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan belanja tidak langsung yang dialokasikan oleh pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota maupun pemerintahan desa di wilayahnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Sebagai wujud dalam proses mendukung desentralisasi fiskal yang sedang terjadi pemerintah propinsi sesuai amanat Permendagri No. 13 tahun 2006 dapat mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, belanja hibah dan belanja bantuan sosial kepada pihak lain selama urusan wajib maupun urusan pilihan yang dialokasikan oleh pemerintah telah dipenuhi terlebih dahulu.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006 ps. 53). Perhitungan atas perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. (PP No. 71 Tahun 2010; lampiran I.08 PSAP07-5).

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDP) perkapita.

Pendapatan Perkapita adalah tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya dilihat dari besar kecilnya GDP atau GNP, karena GDP atau GNP tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GDP atau GNP tersebut. GNP tinggi yang dimiliki suatu negara bukan suatu ukuran bahwa negara tersebut telah makmur. Karena bisa saja jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GNP tersebut juga sangat tinggi. Misalnya, GNP Indonesia pada tahun 1999 lebih tinggi daripada Malaysia, yaitu sebesar 130.600 juta dolar Amerika, sedangkan Malaysia 81.311 juta dolar Amerika. Akan tetapi, Indonesia tidak lebih makmur dari Malaysia, karena dari GNP tersebut, Indonesia harus menghidupi 204 juta penduduk, sedangkan Malaysia hanya menghidupi 22 juta penduduk. Dengan demikian, ukuran yang lebih tepat untuk mengukur kemakmuran (standar taraf hidup) suatu negara adalah dengan menghitung pendapatan per kapapita

Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut.

$$\text{GDP per Kapita} = \frac{\text{GDP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}$$

$$\text{GNP per Kapita} = \frac{\text{GNP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}$$

Ada dua cara menghitung pendapatan perkapita yaitu dengan cara berdasarkan harga yang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Jika dihitung dengan cara harga berlaku maka pendapatan perkapita disebut sebagai pendapatan perkapita nominal. Jika hitung berdasarkan harga tetap hasilnya disebut pendapatan perkapita riil. Pendapatan perkapita nominal adalah pendapatan perkapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan pendapatan perkapita riil sangat memperhatikan perubahan harga atau inflasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Dengan PAD yang tinggi maka daerah akan bisa meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka daerah akan berpacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pelayanan publik bisa terwujud bila pemerintah melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang bisa direalisasikan melalui belanja modal.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Pada saat menyusun APBD pengalokasian belanja modal harus disesuaikan dengan PAD yang diterima.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imas dan Sugeng (2015) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 -2014. Namun melihat posisi belanja modal termasuk Belanja daerah maka bisa juga PAD yang besar akan didistribusikan penggunaannya pada Belanja Daerah lain selain Belanja Modal. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa PAD mempunyai peran yang sangat besar pada kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas.

H1 : Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh pada Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak akan mencukupi bila digunakan untuk melaksanakan program kerja pemerintah daerah. Dalam pembangunan pembangunan daerah diperlukan dana pendamping selain Pendapatan Asli daerah. Dana ini tentunya berasal dari pusat yang disebut sebagai dana transfer. Dana ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

Pada penelitian Sheila (2013) menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh pada alokasi belanja modal. Penelitian Panca dan Rachmawati (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping minimal 10 % dari total alokasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Penelitian Arbie (2013) menunjukan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Ada kalanya Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini dapat dimengerti bila daerah tersebut sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah tersedia, sehingga dana alokasi khusus digunakan hanya untuk menambah dan memperbaiki saja. Penelitian Pancawati dan Rachmawati (20013)

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja Modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Bantuan Keuangan (BK) Terhadap Belanja Modal

Bantuan keuangan merupakan belanja tidak langsung yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota maupun pemerintahan desa di wilayahnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Mengalokasikan bantuan keuangan pada Kabupaten/kota menunjukkan bahwa ada pengaruh dengan Belanja Modal.

Penelitian Pancawati dan Rachmawati (2013) menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja Modal.

H4 : Bantuan Keuangan Berpengaruh Terhadap Belanja Modal.

Pengaruh PAD, DAU, DAK dan BK Terhadap Pendapatan Perkapita

Pengelolaan pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Daerah (PDRB) dibagi jumlah penduduk akan menghasilkan PDRB Perkapita. Dari pembagian ini bila pertumbuhan PDRB tinggi dan pertambahan penduduk relative tetap maka pendapatan perkapita juga akan tinggi. Hubungan ini menunjukkan adanya pengaruh PAD, DAU, DAK dan BK terhadap pendapatan perkapita.

Penelitian Edy dan Marhamah menunjukkan adanya pengaruh yang positif signifikan pada PAD dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB), sedang DAU berpengaruh negative signifikan terhadap PDRB.

Dari uraian diatas dapat pula disusun Hipotesa

H5: PAD berpengaruh melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita

H6: DAU berpengaruh melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita

H7: DAK berpengaruh melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita

H8: BK berpengaruh melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita

H9 : Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Perkapita

Metode Penelitian

1 Polulasi dan Sampel dari penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemilihan sampel menggunakan metoda purposive sampling method yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Sampel yang dipilih memiliki kriteria yakni tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dari tahun 2003 hingga 2015. Adapun sampel penelitian ini menggunakan data dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur, jadi selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2015 keseluruhan sampel data awal sebanyak 456 pengamatan. Teknik Analisis Untuk menguji hipotesis digunakan analisis Dua jalur yang mengukur pengaruh variabel bebas (DAU=X1, DAK=X2, PAD=X3 dan BK=X4) terhadap variabel terikat (Y1) Belanja Modal dan Variabel terikat (Y2) Pendapatan Perkapita. Analisis Dua Jalur mempunyai dua truktur persamaan yaitu:

Persamaan substruktur pertama

$$Y1 = b1 Y1X1 + b2 Y1X2 + b3 Y1X3 + b4 Y1X4 + E1$$

Persamaan substruktur kedua

$$Y2 = b1 Y2X1 + b2 Y2X2 + b3 Y2X3 + b4 Y2X4 + b5 Y2Y1 + E2$$

Pengujian Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita

1. Uji Regresi Secara Simultan atau Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel tergantungnya.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah model baik untuk digunakan sebagai ukuran "kebaikan suai" (*goodness of fit* = R^2). Koefisien (R^2) menyatakan seberapa besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam model terhadap variabel tak bebas.

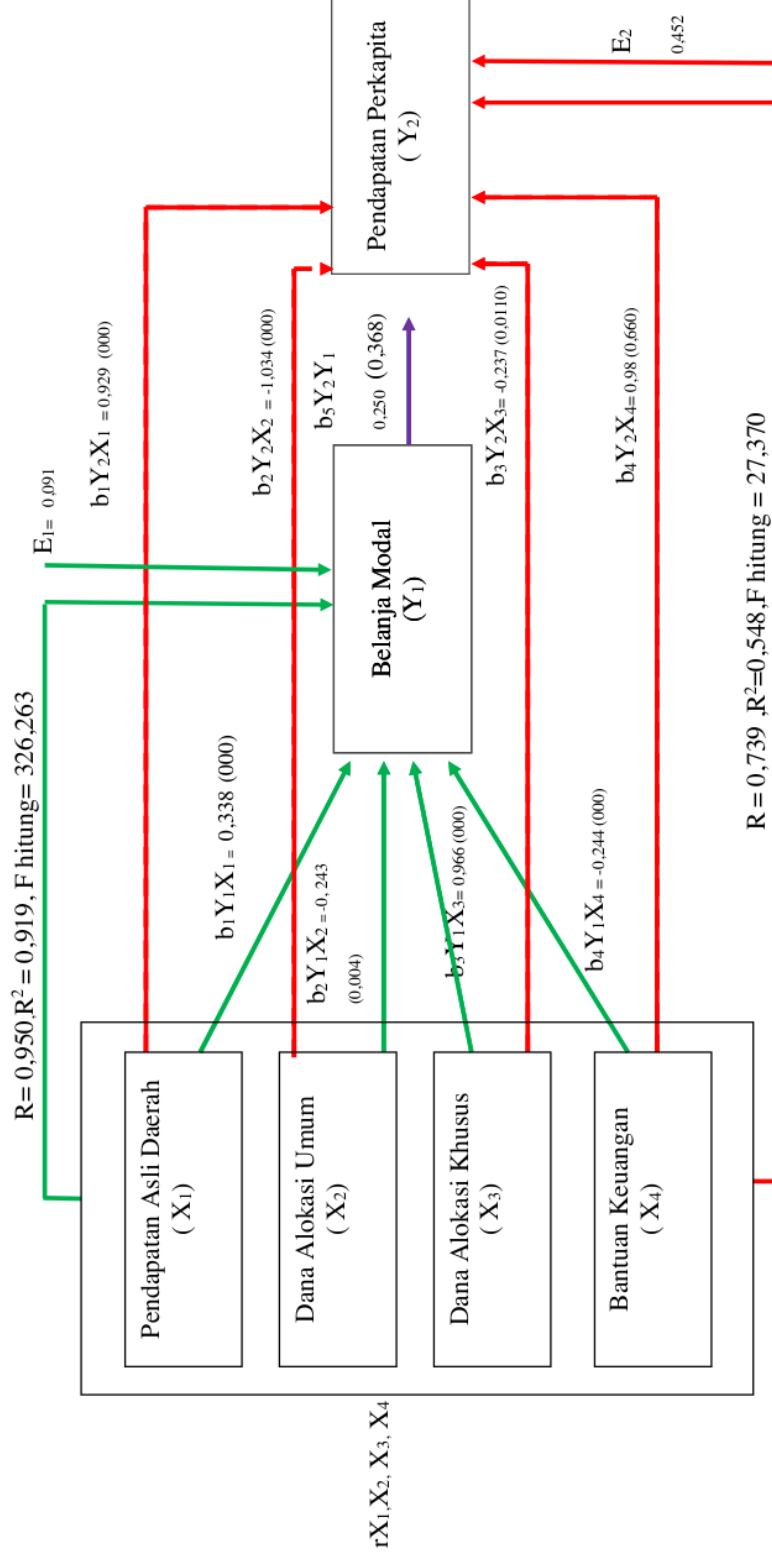
3. Uji Regresi Secara Parsial atau Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bermakna atau tidak dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikan masing-masing variabel bebas dengan nilai derajat kesalahan 5%.

4. Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Koefisien determinasi parsial (r^2) berguna untuk mengetahui variabel bebas mana yang pengaruhnya paling dominan dan kontribusinya paling besar terhadap variabel tergantungnya. Semakin besar (r^2) suatu variabel bebas menunjukkan bahwa semakin dominannya pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel tergantungnya.

Model Analisis Dua Jalur



Gambar 1: Model Analisis Dua Jalur

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Menghitung Koefisien jalur

Koefisien Jalur Model I

Dari pengolahan data tahap I diperoleh pada table coefficient dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari empat variabel yaitu $X_1=0,000$ dan $X_3=0,000$ positif signifikan lebih kecil dari 0,005 dan $X_2=0,004$ dan $X_4=0,000$ negatif signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi Model I yaitu variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y_1 . Besarnya nilai R^2 sebesar 0,919 hal ini menunjukkan kontribusi atau sumbangan pengaruh X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap Y adalah sebesar 91,9% sementara sisanya 8,1% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan demikian diperoleh Model Struktur I sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,338X_1 - 0,243X_2 + 0,966X_3 - 0,244X_4 + 8,1\%$$

Koefisien Jalur Model II

Dari pengolahan data tahap II diperoleh pada table coefficient dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari empat variabel yaitu $X_1 = 0,000$ positif signifikan dan $X_2 = 0,000$ negatif signifikan dan $X_4 = 0,011$ negatif signifikan lebih kecil dari 0,05 sedang $X_3 = 0,368$ dan $Y_1 = 0,660$ tidak signifikan. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi Model II yaitu variabel X_1, X_2, X_4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y_2 . Besarnya nilai R^2 sebesar 0,546 hal ini menunjukkan kontribusi atau sumbangan pengaruh X_1, X_2 , dan X_4 terhadap Y_2 adalah sebesar 54,6% sementara sisanya 45,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan demikian diperoleh Model Struktur II sebagai berikut :

$$Y_2 = 0,929X_1 - 1,034X_2 - 0,237X_4 + 45,2\%$$

B. Uji Hipotesis Dan Pembuatan Kesimpulan

1. Analisis pengaruh X_1 Terhadap Y_1 dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi X sebesar $0,000 < 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_1 terhadap Y_1 .
2. Analisis pengaruh X_2 Terhadap Y_1 dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi X sebesar $0,004 < 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_2 terhadap Y_1 .
3. Analisis pengaruh X_3 Terhadap Y_1 dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi X sebesar $0,000 < 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_3 terhadap Y_1 .
4. Analisis pengaruh X_4 Terhadap Y_1 dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi X sebesar $0,000 < 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_4 terhadap Y_1 .
5. Analisis pengaruh X_1 melalui Y_1 terhadap Y_2 diketahui pengaruh langsung yang diberikan X_1 terhadap Y_2 sebesar 0,929. Sedangkan pengaruh tidak langsung X_1 melalui Y_1 terhadap Y_2 adalah perkalian antara nilai beta X_1 terhadap Y_1 dengan nilai beta Y_1 terhadap Y_2 yaitu $0,338 \times 0,250 = 0,0845$. Maka pengaruh total yang diberikan X_1 terhadap Y_2 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,929 + 0,0845 = 1,0135$. Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,929 dan pengaruh tidak langsung sebesar

- 0,0845 yang berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X_1 melalui Y_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .
6. Analisis pengaruh X_2 melalui Y_1 terhadap Y_2 diketahui pengaruh langsung yang diberikan X_1 terhadap Y_2 sebesar -1,034 . Sedangkan pengaruh tidak langsung X_1 melalui Y_1 terhadap Y_2 adalah perkalian antara nilai beta X_2 terhadap Y_1 dengan nilai beta Y_1 terhadap Y_2 yaitu $-0,243 \times 0,250 = -0,06075$. Maka pengaruh total yang diberikan X_1 terhadap Y_2 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $-1,034 + (-0,06075) = -1,09475$. Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar -1,034 dan pengaruh tidak langsung sebesar -1,09475 yang berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X_2 melalui Y_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .
 7. Analisis pengaruh X_3 melalui Y_1 terhadap Y_2 diketahui pengaruh langsung yang diberikan X_3 terhadap Y_2 sebesar -0,237 . Sedangkan pengaruh tidak langsung X_1 melalui Y_1 terhadap Y_2 adalah perkalian antara nilai beta X_3 terhadap Y_1 dengan nilai beta Y_1 terhadap Y_2 yaitu $0,966 \times 0,250 = 0,2415$. Maka pengaruh total yang diberikan X_1 terhadap Y_2 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,2415 + (-0,237) = 0,0045$. Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar -0,237 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0045 yang berarti pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X_3 melalui Y_1 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .
 8. Analisis pengaruh X_4 melalui Y_1 terhadap Y_2 diketahui pengaruh langsung yang diberikan X_4 terhadap Y_2 sebesar 0,98 . Sedangkan pengaruh tidak langsung X_1 melalui Y_1 terhadap Y_2 adalah perkalian antara nilai beta X_4 terhadap Y_1 dengan nilai beta Y_1 terhadap Y_2 yaitu $(-0,244) \times 0,250 = -0,061$. Maka pengaruh total yang diberikan X_4 terhadap Y_2 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,98 + (-0,061) = 0,919$. Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,98 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,919 yang berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X_4 melalui Y_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .
 9. Analisis pengaruh Y_1 terhadap Y_2 dari Analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Y_1 sebesar $0,660 > 0,005$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan Y_1 terhadap Y_2 .

Kesimpulan Dan saran

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan, Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Perkapita, sehingga tidak perlu melalui Belanja Modal.
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan, Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Perkapita, sehingga tidak perlu melalui Belanja Modal.

5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan, Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak langsung terhadap Pendapatan Perkapita, sehingga perlu melalui Belanja Modal terlebih dahulu untuk mempengaruhi Pendapatan Perkapita.
6. Pengaruh Bantuan Keuangan melalui Belanja Modal terhadap Pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan, Hal ini berarti bahwa Bantuan Keuangan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Perkapita, sehingga tidak perlu melalui Belanja Modal.
7. Belanja Modal Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur lebih menggiatkan untuk menggali potensi-potensi daerah agar dapat memperbanyak Jumlah Pendapatan Asli daerah, Km dalam penelitian ini PAD sangat berpengaruh pada Belanja Modal. Dimana Belanja Modal Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur
2. Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi khusus lebih giat untuk didapatkan dari pemerintah pusat dengan cara membuat program kerja yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur.
3. Bantuan Keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota lebih digiatkan agar pemerintah kabupaten/kota lebih giat melaksanakan program – program pembangunan sehingga kesenjangan antar kabupaten/kota tidak terlalu lebar atau kondisi daerah lebih merata sejahtera.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum dan Bantuan Keuangan berpengaruh langsung terhadap pendapatan Perkapita , untuk itu pemerintah Daerah Jawa Timu harus benar-benar memperhatikan tiga komponen pendapatan daerah ini agar terus dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita di Jawa Timur
5. Dana Alokasi khusus berpengaruh tidak langsung terhadap Pendapatan Perkapita tetapi melalui Belanja Modal terlebih dshulu. Hal ini dapat diterima karena Dana Alokasi Khusus hanya akan di transfer pemerintah pusat jika pemerintah daerah membuat program-program yang pro rakyat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V, Cet. Ke-12, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dana Alokasi Umum, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur, (2017), Bank Indonesia
- Mankiw, G. 2000. *Teori Makroekonomi*. Imam Nurmawan [penerjemah]. Erlangga, Jakarta
- Mentayani, I dan Rusmanto 2013 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi* Vol 9 (2) : 91 – 102
- Mardiasmo, 2002 Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta
- Nazir, 2003, Metode Penelitian, Cetakan Keempat, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Nuarisa, SA (2013) *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Accounting Analysis Journal Semarang
- Sukarwo, Jatimnomics sebuah Model Indonesia Incorporated
- Sugiyono, 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Penerbit Alfabeta Bandung
- Situngkir, A dan Js Manurung 2009, Efek Memiliki Pendapatan Daerah Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus Pada Belanja Modal Di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, *Kajian Akuntansi* Vol 4(2) 92 -103
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (revisi dari UU No 32 Tahun 2004)
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah
- UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

DETERMINAN BELANJA MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI PROVINSI JAWA TIMUR

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.scribd.com

Internet Source

29%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 10%